

**OPORTUNITAS PEMBENTUKAN ENTITAS KEBUDAYAAN BARU,
TINJAUAN TERHADAP IBU KOTA NEGARA (IKN) INDONESIA 2024
BERDASARKAN SEJARAH PERPINDAHAN IBU KOTA VOC 1619**

***OPPORTUNITY FOR NEW CULTURAL ENTITY EMERGENCE,
AN OVERVIEW OF THE CAPITAL CITY (IKN) OF INDONESIA 2024
BASED ON THE HISTORY OF THE RELOCATION
OF THE CAPITAL CITY OF VOC 1619***

**Devina Ocsanda^{1*}, Candrika Ilham Wijaya¹, Muhammad Azzam Al Haq¹,
Julian Dwi Efendi², Ludvia³, Fahmi Prihantoro¹**

¹Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia

²Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia

³Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Penulis korespondensi: devinaocsanda@mail.ugm.ac.id

Diserahkan: 25/9/2022; Diperbaiki: 26/12/2022; Disetujui: 02/03/2023

DOI : 10.47441/jkp.v18i1.291

Abstrak

Perpindahan Ibu Kota Indonesia berpotensi menghasilkan dampak yang signifikan dalam hal kebudayaan, yakni kemunculan entitas budaya baru. Kajian ini membahas mengenai oportunitas pembentukan entitas budaya baru di Ibu Kota Negara (IKN) merferensi perpindahan yang pernah terjadi di masa lampau, yaitu Masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dari Ambon ke Jayakarta-Batavia pada 1619. Kajian mengenai aspek kebudayaan tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat menyiapkan mitigasi yang memadai terhadap potensi konflik yang dapat terjadi di wilayah ibu kota baru. Dengan pendekatan arkeologi lanskap, kondisi di Batavia dan IKN dianalisis dengan konsep elemen pembentuk lanskap fisik dan budaya. Hasil riset ini memperlihatkan perencanaan organisasi ruang, arsitektur, dan tradisi budaya di Batavia ternyata memiliki pola yang sama pada kawasan IKN. Di Batavia, entitas baru telah terbentuk secara nyata yang kini disebut dengan nama Betawi. Terdapat peluang yang sama di IKN dengan kondisi-kondisi yang serupa. Posisi IKN yang relatif berada di tengah wilayah Indonesia serta perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang pesat turut membuat pembentukan entitas budaya baru menjadi lebih dinamis. Peluang terbentuknya entitas budaya baru mengharuskan pemerintah bersiap untuk memperkuat tradisi budaya yang telah eksis sebelumnya dan mengembangkannya bersama dengan entitas budaya yang baru.

Kata kunci: Batavia, IKN, Perpindahan Ibu Kota, Entitas Budaya

Abstract

The relocation of The Capital City of Indonesia potentially causes a significant cultural impact. This Study discusses the opportunity of a new cultural entity forming in Ibu Kota Negara (IKN), referring relocation of VOC's Capital City from Ambon to Jayakarta-Batavia in 1619. The Study of cultural aspects is intended for government to prepare adequate mitigation to potential conflict in the new capital city area. Using landscape archaeology, the condition in Batavia and IKN will be analyzed with the concept of physics and cultural landscape formation. This research's results show that the planning of the spatial organization, architecture, and cultural traditions in Batavia have the same pattern in the IKN area. In Batavia, a new entity had already emerged named Betawi. There will be equal opportunity with similar conditions. The IKN's position relative to the center of Indonesia and the rapid development of information and transport technology can trigger new cultural entities.

Keywords: Batavia, IKN, Capital City Migration, Cultural Entity

PENDAHULUAN

Pembangunan serta konsekuensinya merupakan topik yang tidak pernah tuntas dibahas. Diskursus pembangunan Indonesia kembali muncul setelah pemerintah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Wacana pemindahan ibu kota tersebut menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, mulai dari proses pembangunan, hingga proses perpindahannya. Dari sisi lingkungan, pemindahan bersifat positif karena populasi Jakarta terlampaui padat dan daya dukung lingkungan menurun. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi perlu diintegrasikan dengan isu ekologi sehingga lingkungan tidak menjadi rusak (Malihah 2022). Namun, kebijakan pemindahan ini juga berisiko membebani pembiayaan negara (Hasibuan and Aisa 2020). Meskipun demikian, masih terdapat dampak yang jarang disadari dari perpindahan ibu kota salah satunya adalah dampak budaya. Pembangunan harus seimbang antara fisik dan nonfisik. Misalkan saja dalam menghadapi entitas budaya baru yang berpeluang muncul menyertai perpindahan.

Entitas kebudayaan adalah bingkai besar dari wujud kebudayaan. Budaya memiliki tiga wujud, yaitu ide-ide atau gagasan, tindakan atau perilaku, dan kebudayaan fisik atau material (Koentjaraningrat 1990; Soekiman 2014). Ketiga wujud budaya bersifat saling mempengaruhi. Perubahan dalam satu wujud dapat menimbulkan perubahan pada wujud yang lain. Perpindahan Ibu Kota yang sejatinya merupakan perubahan budaya material berpotensi menimbulkan perubahan masyarakat yang pada akhirnya turut memunculkan peluang timbulnya entitas budaya baru.

Berbagai riset tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia pada tahun 2024 telah dilakukan. Terdapat riset tentang kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap wacana IKN di Palangka Raya dari aspek kesiapan lahan, SDM, dinamika sosial-budaya, keamanan, dan daya dukung lingkungan (Toun 2018). Analisis kuantitatif kesiapan masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja terhadap rencana pemindahan ibu kota juga telah terlaksana (Dewi dkk 2020). Dalam bidang kebudayaan (linguistik), terdapat riset ancaman dan strategi konservasi eksistensi bahasa lokal terkait pemindahan ibu kota (Budiarta 2019). Penelitian aspek kebudayaan di IKN masih sedikit yang berfokus pada catatan historis maupun bukti arkeologis mengenai potensi dampak budaya yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan riset yang mampu melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis dan menawarkan kemungkinan terbentuknya hal baru, seperti entitas budaya serta strategi untuk dampak yang terjadi.

Banyak terjadi perpindahan ibu kota pada masa lampau yang menghasilkan dampak positif maupun negatif. Strategi yang ditempuh guna memperoleh dampak positif dan menanggulangi dampak negatif yang diakibatkan oleh perpindahan ibu kota tersebut dapat menjadi pelajaran berharga dalam mempersiapkan perpindahan Ibu Kota Indonesia. Di antara perpindahan-perpindahan ibu kota yang pernah terjadi di Nusantara pada masa lalu, pemindahan Ibu Kota *Vereenigde Oost-indische Compagnie* (VOC) dari Ambon ke Batavia dapat ditilik kembali untuk referensi mengenai aspek kebudayaan yang berpotensi muncul di kawasan IKN nanti. Hal ini disebabkan oleh pemindahan Ibu Kota VOC tersebut membawa dampak besar budaya, yakni kemunculan entitas budaya baru. Budaya Betawi yang kini dianggap secara luas sebagai budaya asli Jakarta sejatinya merupakan entitas baru yang terbentuk setelah perpindahan Ibu Kota VOC.

Proses kehadiran entitas budaya baru dapat dilihat dari 11 elemen pembentuk lanskap yang meliputi *land use* dan aktivitas, pola organisasi ruang, respons terhadap lingkungan alam, tradisi budaya, jaringan sirkulasi, batas wilayah, vegetasi, bangunan dan struktur, klaster, situs arkeologi, serta elemen skala kecil (McClelland et al. 1990). Dari 11 elemen pembentuk lanskap oleh McClelland dkk (1990) tersebut maka akan menekankan pada tiga dimensi elemen, yakni pola organisasi ruang, bangunan dan struktur, tradisi budaya karena hanya tiga elemen tersebut yang dapat diamati dan dibandingkan antara Batavia dan wilayah IKN. Analisis terhadap tiga elemen tersebut sejatinya juga dapat

digunakan sebagai pijakan awal untuk mengkaji elemen-elemen pembentuk lanskap lainnya. Riset mengenai proses kemunculan budaya baru hasil perpaduan budaya pendatang di Batavia dapat menjadi gambaran mengenai fenomena serupa yang memiliki oportunitas untuk dapat terjadi di Ibu Kota Negara Indonesia 2024. Berdasarkan permasalahan dan urgensi yang telah diuraikan, penelitian dengan pendekatan arkeologi lanskap yang didukung data sejarah dan antropologi perlu diselenggarakan untuk melihat peluang kemunculan entitas budaya baru di IKN Indonesia pada tahun 2024 melalui komparasi dengan perpindahan ibu kota VOC pada tahun 1619.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari data yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti (Wirartha 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan arkeologi lanskap (Yuwono 2007) dengan analisis elemen pembentuk lanskap oleh McClelland dkk (1990). Riset ini merupakan *desk-based study* yang memanfaatkan arsip (dokumen, foto, gambar peta) serta sumber sekunder dan tersier mengenai lanskap dan budaya di Batavia dan IKN. Data yang dikumpulkan merupakan data yang berkaitan dengan aspek fisik dan nonfisik dua kawasan tersebut.

Penelitian ini melalui empat tahapan. Riset ini dimulai dengan perumusan masalah dengan mengidentifikasi persoalan yang menjadi isu menarik dari perpindahan IKN. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengumpulan data dari Batavia maupun IKN yang meliputi kondisi ruang dan rencana wilayah serta kehidupan budaya. Selanjutnya, data dianalisis dengan kerangka elemen pembentuk lanskap (McClelland et al. 1990). Tahap analisis juga meliputi interpretasi kondisi yang menyebabkan terbentuknya entitas budaya baru di Batavia yang kemudian dikomparasikan dengan perkiraan kondisi di IKN. Hasil komparasi kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan guna mengetahui oportunitas pembentukan entitas budaya baru di IKN serta dampak dan strategi dalam menghadapinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Budaya dan Reaksi Masyarakat Akibat Perpindahan Ibu Kota VOC pada Tahun 1619

Terjadi perpindahan-perpindahan ibu kota pada masa lalu dengan dampak positif maupun negatifnya. Kerajaan-kerajaan besar di Nusantara diketahui memindahkan ibu kota seperti Kerajaan Mataram Kuno (Andreastuti dkk 2006). Pada masa pengaruh Islam, Kerajaan Mataram Islam memindahkan ibu kotanya merespons keadaan politik. Lima kota yang pernah menjadi ibu kota Mataram Islam adalah Kotagede, Kerto, Plered, Kartasura, dan Surakarta (Ricklefs 2008). Kemudian pada periode yang beririsan dengan masa pengaruh Islam, pemindahan ibu kota juga turut dilakukan oleh pemerintah kolonial. *Vereenigde Oost-indische Compagnie* (VOC) yang pada awalnya memilih Ambon sebagai ibu kota pertamanya di Nusantara kemudian memindahkannya ke Jayakarta pada 1619 dengan berbagai pertimbangan (Blak et al 2007). Semua perpindahan ibu kota tersebut berdampak pada perubahan lanskap fisik dan nonfisik wilayah baru karena wilayah tersebut menjadi lebih padat penduduk dari sebelumnya.

Entitas budaya baru yang terbentuk dari pemindahan ibu kota tidak bisa dilepaskan dari perubahan budaya yang terjadi. Perubahan budaya merupakan bagian dari dinamika keruangan. Aspek keruangan yang terdiri atas lanskap fisik dan budaya menjadi bagian dan memengaruhi kehidupan manusia baik skala makro maupun mikro. Lanskap budaya merupakan hasil interaksi antara lanskap fisik dan manusia (Plumwood 2006; UNESCO 2012). Perubahan aspek lanskap suatu komunitas dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu

lanskap biosfer–seterusnya akan disebut lanskap fisik–dan lanskap budaya (Awalia dkk 2017).

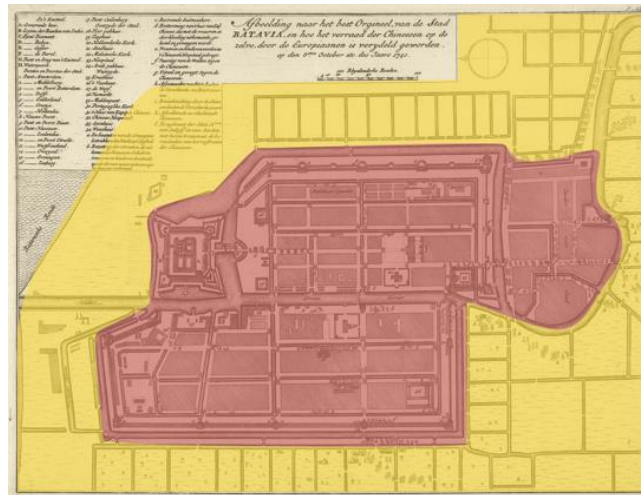
Dari berbagai elemen pembentuk lanskap yang dikemukakan oleh McClelland dkk (1990), tiga elemen dipilih untuk dianalisis lebih lanjut dalam rangka mengetahui perubahan budaya akibat pemindahan ibu kota masa VOC pada tahun 1619 dan perkembangan Kota Batavia. Tiga elemen tersebut adalah (1) pola organisasi ruang, (2) bangunan dan struktur yang merupakan bagian dari ruang, serta (3) tradisi budaya yang hidup dalam ruang dan sebagai respons perubahan ruang. Melalui tiga elemen tersebut perubahan budaya dan syarat-syarat terjadinya entitas budaya baru berusaha untuk dilihat.

Dalam perpindahan ibu kota, perubahan organisasi ruang menjadi hal yang lazim terjadi. Kenyataan ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan ruang yang bisa mendukung suatu wilayah untuk menjadi kawasan ibu kota. Kasus ini juga terjadi pada Jakarta. Perubahan budaya di Jakarta terjadi sangat cepat karena merupakan wilayah pelabuhan sehingga memiliki kehidupan yang dinamis dan menyebabkan kebudayaan di wilayah ini mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu (Blackburn 2012). Salah satu episode penting dalam perkembangan Jakarta adalah ketika pendudukan VOC pada periode 1600–1800, yaitu saat Jayakarta bertransformasi menjadi Batavia. VOC sendiri terbentuk setelah Parlemen Belanda (*Staten-Generaal*) mengusulkan agar perusahaan-perusahaan dagang Belanda melakukan fusi untuk merespons persaingan dagang pedagang Eropa di Nusantara (Blak et al 2007; Poesponegoro and Notosusanto 2008; Ricklefs 2008). Meskipun secara resmi berstatus sebagai serikat dagang, VOC juga berperan sebagai perpanjangan tangan Belanda dalam pembentukan koloni sehingga VOC memperoleh “hak oktroi” yang membuatnya dapat beroperasi layaknya sebuah negara. VOC dapat membuat pusat administrasi dan bisnisnya di Asia Tenggara dan Timur.

Di bawah kekuasaan VOC, Batavia mengalami perubahan drastis dari kehidupan pelabuhan tradisional menjadi modern. Perubahan tersebut terlihat dari peta Jayakarta sebelum 1619 hingga peta Batavia 1780. Peta-peta tersebut merupakan peta buatan ahli atau pihak dari Belanda sehingga sudut pandang pembuatan peta adalah wilayah yang diduduki dan dikembangkan (pemerintah) VOC. Sudut pandang penggambaran ini akan memengaruhi analisis yang bertolak dari sisi kolonial dan kemudian ditarik ke sisi Nusantara. Dari peta tampak perubahan luas wilayah, keberadaan benteng dan bangunan-bangunan penting, serta yang paling penting pembangunan tembok dan parit.

Pada peta sebelum tahun 1619, terlihat VOC hanya memiliki wilayah seluas bangunan bernama Nassau (*oude huis*) dan Mauritius (*nieuwe huis*) di timur muara Sungai Ciliwung. Pada tahun 1611 Nassau mulai dibangun yang diikuti oleh Mauritius tahun 1617 (Haan 1922). Baru pada tahun 1619, tergambar VOC telah memiliki benteng bernama Fort Jacatra. Luas wilayah VOC bertambah dari luas dua bangunan menjadi luas satu benteng. Yang dimaksud benteng sendiri sejatinya merupakan bangunan untuk menghalangi potensi invasi juga mengontrol wilayah (Hogg 1981). Pembangunan Fort Jacatra mencerminkan kedudukan VOC yang semakin tertata dalam pertahanan militer selain merefleksikan banyaknya ancaman yang VOC terima. Fungsi benteng pada beberapa kasus berubah seiring pertumbuhan dan perkembangan kota (Marihandono 2008). Fort Jacatra pada masa itu menjadi tempat perdagangan sekaligus administrasi VOC. Fort Jacatra kemudian menjadi pusat pengembangan Batavia ke arah selatan yang terlihat dari peta tahun 1622. Fort Jacatra lalu dikembangkan lagi melalui proyek pembangunan kastel. Kemudian, Jayakarta berubah menjadi Batavia (Chijs 1885; Vlekke 2008). Batavia dianggap memiliki potensi sehingga J.P. Coen ingin membentuk pusat pemerintahan selain menguasai perdagangan. Keseriusan VOC dalam memperluas Kota Batavia tampak pada peta 1632 yang terlihat dari penataan kota hingga barat Kali Besar. Pada peta-peta tahun berikutnya, Batavia terlihat sebagai kota besar dengan tembok beserta wilayah periferinya (*Ommelanden*) (Jonge 1877; Kanumoyoso 2011).

Perubahan organisasi ruang, khususnya pembatasan ruang dengan banteng, menyebabkan Batavia dan *Ommelanden* tersegregasi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Batavia mulai tahun 1650. Wilayah dalam tembok tidak terlalu dinamis karena penghuni yang homogen (mayoritas Eropa) dengan kepentingan pemerintahan. Wilayah luar tembok kota merupakan wilayah yang dihuni oleh pendatang dari pelbagai latar belakang—entah datang mandiri ataupun didatangkan.



Gambar 1. Pola keruangan Batavia yang menunjukkan bahwa Batavia terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan di dalam tembok dan di luar tembok

Sumber: Rijksmuseum; Dimodifikasi dari Peta Batavia 1740

Perkembangan Batavia juga menimbulkan perubahan pada aspek arsitektur. Dalam lanskap fisik, arsitektur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang memilikinya. Arsitektur merupakan bagian kehidupan masyarakat berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat dijadikan sebagai indikasi untuk melihat aspek-aspek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada suatu masa, termasuk untuk melihat perubahan budaya.

Pada masa awal, arsitektur yang dikembangkan VOC berupa arsitektur pertahanan diri. Gaya arsitektur tersebut didatangkan mentah-mentah oleh VOC di antara masyarakat *vernakular* (lokal Nusantara). Contoh untuk membedah arsitektur awal Batavia adalah Rumah Gubernur Jenderal dalam benteng dan Toko Merah. Arsitektur semacam ini tidak ramah area tropis. Aspek yang paling mencolok adalah bata tebal sebagai bahan dinding yang kuat dan kokoh. Atap dibuat dengan tritisan (lebih) kecil atau tanpa tritisan sama sekali. Rumah pada masa awal Batavia tidak memiliki teras. Jendela pada rumah berukuran besar tanpa ventilasi memadai. Banyak cahaya masuk melalui jendela dan kelembaban tinggi tidak dapat dihindarkan dari kurangnya ventilasi silang (Widodo 2009). Arsitektur pada masa selanjutnya adalah Landhuizen yang lebih menyesuaikan iklim Batavia dan pengorganisasian ruang. Namun, arsitektur ini justru makin menuju ke arah kemegahan Eropa. Rumah Landhuizen awalnya ditemukan di luar tembok Batavia, khususnya di wilayah Weltevreden (Tjahjono 1998) seperti Rumah Reiner de Klerk dan Rumah van der Para. Walaupun terletak di Weltevreden luar tembok kota, gaya arsitektur ini merupakan perpanjangan kebudayaan dalam tembok kota.

Gaya arsitektur yang dikembangkan masyarakat Eropa di Batavia kontras dengan arsitektur masyarakat yang menghuni wilayah periferi (*Ommelanden*). Gaya arsitektur yang berkembang di area periferi merupakan arsitektur tradisional—mungkin juga dapat

disebut rumah adat—sebagai hasil pertemuan budaya yang heterogen yang masih terpengaruh dengan arsitektur *vernakular* (lokal Nusantara) yang berkembang sebelumnya.

Pengorganisasian ruang di Batavia memunculkan sub-ruang baru di Batavia, yaitu dalam tembok kota dengan kehidupan yang lebih statis dan luar tembok kota dengan kehidupan yang lebih dinamis. Proses perkembangan kota Batavia pada abad-17 hingga 19 sesuai dengan model *Concentric Zones* oleh Burgess (1925) yang menjelaskan bahwa perkembangan tata guna lahan suatu kota bersifat sirkular dengan berpusat pada CBD dan area industri (*Central Business District*), kemudian area yang lebih luar digunakan untuk kawasan pemukiman dengan penduduk yang paling kaya menghuni daerah paling tepi.

Dari perubahan budaya yang tampak pada pola organisasi ruang dan arsitektur bangunan, terdapat dua gagasan budaya yang terlihat, yaitu gagasan budaya eksklusif dan gagasan budaya akomodatif. Gagasan budaya yang eksklusif dimiliki oleh penduduk dalam tembok kota dan gagasan budaya yang akomodatif dimiliki oleh penduduk *Ommelanden* atau luar tembok kota. Gagasan budaya eksklusif di dalam tembok kota dilihat dari penduduk di area tersebut yang memiliki perilaku membatasi diri dan memiliki kebudayaan material yang menonjolkan kemegahan. Lain halnya dengan gagasan budaya akomodatif di luar tembok kota yang penduduknya memiliki perilaku membaur dan tidak memiliki kebudayaan material yang pakem. Segregasi ruang yang diterapkan di Batavia tersebut pada akhirnya menimbulkan segregasi kebudayaan pula.

Area dalam tembok kota Batavia yang dihuni oleh masyarakat Eropa akan otomatis berkebudayaan Eropa. Di sisi lain, wilayah luar tembok kota Batavia diisi oleh masyarakat multietnis yang membawa berbagai macam kebudayaan. Gaya hidup adaptif yang dijalankan oleh masyarakat multietnis tersebut menghasilkan entitas kebudayaan baru yang merupakan hasil perpaduan banyak budaya di dalamnya. Masyarakat bergaya hidup *mestizo* (campur-campur) (Taylor 2009). Beberapa contoh bentuk budaya hasil percampuran tersebut adalah seni Gambang Kromong yang merupakan perpaduan budaya Tionghoa, Arab, Eropa, dan Melayu; pertunjukan wayang yang mendapat pengaruh dari budaya Jawa; seni ondel-ondel yang berakar dari budaya Bali. Selain itu, masyarakat Batavia yang majemuk juga menuntut adanya bahasa yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi oleh setiap anggota masyarakat. Bahasa yang kemudian digunakan adalah Bahasa Melayu Pasar yang berkembang dari Bahasa Melayu (Taylor 2009).

Masyarakat luar tembok dengan gagasan budaya akomodatifnya bereaksi dengan menciptakan tempat peleburan budaya. Di luar tembok kota, berbagai etnis hidup bercampur baur dengan masyarakat tempatan yang pada awalnya pun merupakan masyarakat yang sudah majemuk. Akibatnya, masyarakat di luar tembok kota makin kehilangan identitas etnis asalnya. Mereka melebur dalam satu area *melting pot*. Entitas baru hasil peleburan ini berkembang dari wujud budaya yang dibawa masyarakat luar tembok, yaitu gagasan akomodatif, perilaku membaur, dan tidak memiliki kebudayaan material yang pakem.

Wujud kebudayaan di luar tembok Batavia tersebut pada akhirnya membentuk sebuah entitas budaya besar yang baru, yaitu budaya Betawi—disebut Betawi di paruh awal 1900-an. Penduduk luar tembok ini hidup bersama sekian lama dari masa VOC dan berbicara dengan bahasa yang sama mengakibatkan mereka mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli Batavia.

Oportunitas Pembentukan Entitas Kebudayaan Baru di Ibu Kota Negara (IKN) Bertolak dari Aspek Kebudayaan Perpindahan Ibu Kota VOC pada tahun 1619

Rencana-rencana pemindahan ibu kota kembali bermunculan setelah Indonesia berhasil menjadi negara merdeka yang mandiri mengambil keputusan. Berselang 338 tahun dari pemindahan Ambon ke Batavia, Presiden Soekarno mencetuskan ide pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Palangka Raya pada tahun 1957. Lalu pada tahun 1997, Presiden Soeharto mewacanakan pengembangan kawasan Jonggol sebagai pusat pemerintahan

Rencana dalam zonasi IKN kemudian secara perlahan diimplementasikan dalam pembuatan desain arsitektur di wilayah inti. Bagian paling menonjol dalam rancangan pembangunan kawasan IKN yang telah dipublikasikan adalah bangunan Istana Negara Indonesia yang akan menjadi tempat tinggal presiden. Desain Istana Negara di IKN yang terpilih akan dibangun di lahan seluas 55,7 hektare dengan luas tapak 334.200 meter persegi dengan bentuk burung garuda yang sedang mengepakkan sayap (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2022). Pemilihan garuda sendiri tidak bisa dilepaskan dari makna simbol garuda, yakni sebagai simbol persatuan yang menyatukan berbagai macam keberagaman. Khusus untuk Bangunan Kantor Presiden yang diberi nama Istana Garuda akan ditempatkan pada posisi tertinggi dari keseluruhan kawasan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2022).

Rencana tata ruang IKN dapat dikaitkan dengan konsep penataan ruang kota *City of Tomorrow* yang dicetuskan oleh Le Corbusier (1929). Menurut Le Corbusier, masyarakat kota lebih memilih untuk tinggal di pinggiran kota daripada di dalam kota sehingga perencanaan kota perlu dilakukan dengan mengalokasikan bagian tengah kota untuk pusat-pusat kegiatan, seperti pemerintahan dan bisnis, dan membatasi area pusat tersebut dengan kawasan hijau. Sementara itu, sabuk perumahan harus dikembangkan di pinggiran kota dengan tetap menyisakan ruang untuk perkembangan kota di masa depan.

Adanya perbedaan perencanaan organisasi ruang IKN dan arsitektur antara Kawasan Inti dan Kawasan Pengembangan dapat menyebabkan perbedaan budaya yang mencolok di antara keduanya sehingga berpengaruh terhadap kemunculan tradisi kebudayaan. Walaupun tidak terpisah oleh benteng seperti di Batavia, pembuatan zona-zona berikut perbedaan perencanaannya akan membuat segregasi keruangan yang sama seperti di Batavia. Akhirnya, kondisi keruangan di IKN dan Batavia dapat disamakan. Kawasan Inti IKN dapat diperbandingkan dengan area dalam tembok kota dan kemungkinan juga akan lebih teratur dalam hal organisasi ruang dan arsitekturnya. Keteraturan ini kemungkinan bisa terlihat dari pola-pola jalan, arsitektur gedung, hingga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun. Sementara itu, Kawasan Pengembangan atau periferi yang berkebalikan dengan Kawasan Inti dapat dibandingkan dengan area luar tembok Batavia.

Di samping adanya persamaan antara Batavia dan IKN dalam hal tata ruang, arsitektur, dan tradisi budaya, perlu diperhatikan pula perbedaan zaman yang melatari kedua perpindahan ibu kota tersebut. Teknologi transportasi yang semakin modern akan mempermudah arus perpindahan manusia dan barang antarwilayah. Selain itu, teknologi informasi yang semakin berkembang juga akan turut memperlancar peredaran informasi sehingga memungkinkan penataan ruang yang lebih fleksibel. Patut diperhatikan pula bahwa posisi IKN yang relatif berada di tengah wilayah Indonesia membuat kawasan tersebut menjadi lebih mudah dijangkau oleh penduduk dari berbagai wilayah Indonesia. Pertemuan berbagai gagasan dan latar kebudayaan di wilayah IKN yang menyertai perpindahan penduduk tersebut membuat proses pembentukan entitas kebudayaan berpotensi lebih dinamis.

Selain potensi kemunculan budaya baru, eksistensi tradisi budaya masyarakat lokal yang berkembang sejak lama di kawasan IKN juga patut untuk dicermati. Pembangunan IKN sedikit banyak akan berpengaruh pada kehidupan komunitas lokal, khususnya dalam aspek kebudayaan. Kawasan Pengembangan yang penataan ruangnya bersifat lebih dinamis dan fleksibel berpeluang besar menjadi ajang pertemuan antara kebudayaan lokal yang sudah eksis di lokasi IKN dengan kebudayaan yang dibawa oleh pendatang dari berbagai latar belakang.

Tabel 1. Komparasi lanskap fisik dan budaya Batavia dengan IKN

No.	Aspek	Batavia	IKN
1.	Pola organisasi ruang	Tersegregasi atas wilayah dalam tembok kota dan luar tembok kota	Terbagi menjadi Kawasan Inti IKN dan Kawasan Pengembangan
2.	Corak keruangan	Dalam tembok khusus untuk pemerintah VOC dan masyarakat Eropa serta luar tembok yang dihuni pendatang	Kawasan Inti IKN direncanakan untuk kepentingan penunjang pemerintahan serta Kawasan Pengembangan tidak memiliki perencanaan khusus (fleksibel)
3.	Kehidupan budaya masyarakat	Dalam tembok lebih homogen dengan kebudayaan Eropa; Luar tembok heterogen dengan budaya akomodatif untuk berbagai masyarakat	Kawasan Inti IKN berpotensi tidak akan banyak terjadi heterogenitas budaya; Kawasan Pengembangan berpotensi dihuni masyarakat heterogen pendatang
4.	Oportunitas pembentukan entitas kebudayaan baru	Telah terbentuk entitas budaya baru yang kemudian disebut Betawi di luar tembok kota	Berpotensi terbentuk entitas budaya baru di Kawasan Pengembangan yang memiliki kondisi lanskap mirip dengan luar tembok kota Batavia

Kehidupan di Kawasan Pengembangan IKN berpotensi sangat heterogen seperti di *Ommelanden*. Hal ini juga dikarenakan potensi migrasi jika pusat administrasi dan bisnis negara berpindah. Penduduk non pemerintah yang bermigrasi tidak akan mungkin tinggal di Kawasan Inti karena digunakan untuk pemerintahan. Hal ini sama seperti ketika VOC mengembangkan wilayah selatan benteng untuk pemukiman masyarakat Eropa. Masyarakat Kalimantan Timur sendiri sudah cukup heterogen mengingat adanya transmigrasi dan latar sejarah lainnya. Wilayah sekitar IKN juga dihuni oleh masyarakat adat yang meliputi Paser, Kutai, serta Dayak Kenyah, Modang, Benuaq, Tunjung, Punan, dan Basab (Sujana 2019; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020).

Situasi perbedaan antara Kawasan Inti dan Pengembangan menjadikan peluang terbentuknya budaya majemuk di Kawasan Pengembangan lebih besar. Dalam teori situasional, etnisitas bukan ditentukan berdasarkan unsur biologis, melainkan akibat dari penentuan dan pemeliharaan atas batas-batas etnis oleh kelompok yang bersangkutan (Barth 1988). Perpindahan penduduk yang berasal dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di IKN membuat Kawasan Pengembangan akan memiliki budaya yang beraneka ragam dan lebih akomodatif untuk semua orang dari berbagai latar belakang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Wilayah Batavia terbagi menjadi wilayah dalam tembok kota yang didominasi orang Eropa dan luar tembok kota yang dihuni oleh pendatang yang beragam. Segregasi tersebut menghasilkan dua corak budaya yang berbeda. Wilayah dalam tembok kota memiliki perencanaan yang teratur dan hanya dihuni oleh penguasa. Hasilnya adalah demografi yang relatif homogen dan memunculkan budaya eksklusif. Sementara itu, penghuni wilayah luar tembok dibiarkan hidup berbau dan berbudaya sesuai masyarakat penghuninya. Hasilnya adalah demografi yang lebih heterogen dan menimbulkan budaya akomodatif yang

kemudian menghasilkan entitas budaya baru, yakni Betawi. Kemunculan budaya Betawi merupakan reaksi peleburan budaya di wilayah luar tembok kota.

Rencana pembagian keruangan IKN menjadi Kawasan Inti dan Kawasan Pengembangan berpotensi menghasilkan hal serupa. Berbeda dengan Kawasan Inti yang dikhususkan untuk kegiatan pemerintahan dan telah direncanakan dengan rapi, Kawasan Pengembangan merupakan wilayah yang belum direncanakan secara sistematis dan tertata. Faktor sosial-ekonomi membuat penduduk yang bermigrasi ke IKN untuk mengadu nasib cenderung memilih bertempat tinggal di Kawasan Pengembangan. Situasi tersebut sama seperti kondisi Batavia, yang mana pendatang yang tiba di Batavia akan tinggal di wilayah luar tembok kota. Pembauran budaya yang berpotensi terjadi di Kawasan Pengembangan membuat wilayah tersebut memiliki oportunitas terbentuknya sebuah entitas kebudayaan baru.

Rekomendasi

Melalui hasil penelitian ini dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk melindungi masyarakat tempatan beserta kearifannya, implementasi secara maksimal Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sangat diperlukan sebagai bagian dari pembangunan nonfisik IKN. Pemajuan Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sendiri diartikan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
2. Berbekal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, perlu pembentukan wadah konservasi dan kolaborasi kebudayaan untuk memajukan budaya masyarakat tempatan, pendatang, maupun budaya yang berpeluang muncul. Model konservasi dan kolaborasi kebudayaan tak benda sudah banyak dilakukan dan bahkan terlembaga melalui Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK). Keberadaan balai-balai pelestarian dapat dikembangkan menjadi wadah yang lebih berorientasi pada pelaku budaya. Dampaknya, pelaku budaya dan masyarakat pendukung kebudayaan akan merasa diakui dan tidak diobjektifikasi oleh *stakeholder* sebagaimana undang-undang tersebut yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan banyak dukungan sehingga riset ini dapat terlaksana tanpa adanya suatu halangan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreastuti, Supriati Dwi, Chris Newhall, and Joko Dwiyanto. 2006. "Menelusuri Kebenaran Letusan Gunung Merapi 1006." *Jurnal Geologi Indonesia* 1 (4): 201–7.
- Awalia, Rezky Nur, Nurhayati, and Kaswanto. 2017. "Kajian Karakter Pembentuk Lanskap Budaya Masyarakat Adat Kajang Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Lanskap Indonesia (JLI)* 9 (2): 91–100.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. 2022. *Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka*. Kutai Kartanegara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. 2022. *Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka*. Penajam Paser Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bappenas. 2021. *Buku Saku Pindahan Ibu Kota Negara*. Jakarta.
- Barth, F. 1988. *Kelompok Etnik Dan Batasannya*. Jakarta: UI Press.
- Blackburn, Susan. 2012. *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Blak, G. L., F. v. Dijk, and D. J. Kortlang. 2007. *Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)=De Archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) En de Locale Instellingen Te Batavia (Jakarta)*. Leiden: Brill.
- Budiarta, I Wayan. 2019. "Eksistensi Bahasa Lokal Terkait Pindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur: Ancaman Dan Strategi Pemertahanannya." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2-2): 1-9.
- Burgess, Ernest W. 1925. "The Growth of the City: An Introduction to a Research Project." In *The City*, 47-62. Chicago: University of Chicago Press.
- Chijs, Jacobus Anne van der. 1885. *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602-1811*. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
- Corbusier, le. 1929. *The City of Tomorrow and Its Planning*. London: John Rodker.
- Dewi, Maulida Rachmalia, Elin Diyah Syafitri, and Ajeng Nugrahaning Dewanti. 2020. "Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku Dan Samboja Terhadap Rencana Pindahan Ibu Kota Negara Indonesia." *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 16 (4): 300-313.
- Haan, F. de. 1922. *Oud Batavia*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Hasibuan, R.R.A., and Aisa S. 2020. "Dampak Dan Resiko Pindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5 (1): 183-203.
- Hogg, Ian v. 1981. *The History of Fortification*. New York: St Martin's Press.
- Hutasoit, Wesley Liano. 2018. "Analisa Pindahan Ibukota Negara." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 39 (2): 108-28.
- Jonge, Johan Karel J. d. 1877. *De Opkomst van Het Nederlandsch Gezag over Java, Vijfde Deel. s'.* Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Kanumoyoso, Bondan. 2011. "Beyond the City Wall: Society and Economic Development in The Ommelanden of Batavia, 1684-1740." Leiden: Leiden University.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2022. "Desain Istana Kepresidenan Di IKN Dan Ikoniknya Garuda." 2022. <https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/desain-istana-kepresidenan-di-ikn-dan-ikoniknya-garuda>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. "Kabupaten Penajam Paser Utara Akan Jadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Yuk Kenali Rupanya." 2020. <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Pustaka.
- Malihah, Lola. 2022. "Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17 (2): 219-32. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>.
- McClelland, Linda Flint, J. Timothy Keller, Genevieve P. Keller, and Robert Z. Melnick. 1990. "Guidelines for Evaluating and Documenting Rural Historical Landscapes." 30.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. "Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan." Jakarta.

- . 2022. “Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” Jakarta.
- Plumwood, Val. 2006. “The Concept of a Cultural Landscape: Nature, Culture and Agency in the Land.” *Ethics and the Environment* 11 (2): 115–50.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, and Nugroho Notosusanto, eds. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia. IV, Kemunculan Penjajahan Di Indonesia (±1700-1900)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, Merle Calvin. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Depok: Serambi Ilmu Semesta.
- Soekiman, Djoko. 2014. *Kebudayaan Indis Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Sujana, I Nyoman. 2019. “Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Timur Sebagai Rencana Ibu Kota Negara.” In *Harapan Masyarakat Dan Kearifan Lokal Dengan Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan*, 49–57.
- Taylor, Jean Gelman. 2009. *The Social World of Batavia: European and Eurasian in Dutch Asia*. United States: The University of Wisconsin Press.
- Tjahjono, Gunawan. 1998. *Indonesian Heritage: Arsitektur*. Jakarta: Buku Antar Bangsa.
- Toun, Nicodemus R. 2018. “Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ke Kota Palangkaraya.” *Jurnal Akademia Praja* 1 (1): 129–48.
- UNESCO. 2012. “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.” Paris.
- Vlekke, Bernard Hubertus Maria. 2008. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Widodo, J. 2009. *Masa Lalu Dalam Masa Kini Arsitektur Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yuwono, Jarwo Susetyo Edy. 2007. “Kontribusi Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Berbagai Skala Kajian Arkeologi Lansekap.” *Berkala Arkeologi* 27 (2): 81–102. <https://doi.org/10.30883/jba.v27i2.954>.